



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Peran Regulasi Pemerintah Sebagai Stabilisator dan Pengawas Pasar dalam Perspektif Ekonomi Makro

Rizky Kurniawan*, Rosidah

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

* Corresponding author e-mail: ahmadfatin93@gmail.com

DOI : 10.32832/diversityjournal.v6i2.24054

ABSTRAK

Regulasi pemerintah memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengawasi mekanisme pasar di tengah dinamika ekonomi global, tekanan inflasi, serta meningkatnya potensi kegagalan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi pemerintah sebagai stabilisator ekonomi dan pengawas pasar dalam perspektif ekonomi makro serta menganalisis implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi literatur (*library research*), pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga ekonomi nasional dan internasional. Analisis data kemudian dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemerintah—melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pengawasan persaingan usaha, dan regulasi sektor keuangan—berpengaruh positif terhadap pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta perlindungan konsumen. Ditemukan pula bahwa regulasi yang efektif mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar. Kendati demikian, regulasi yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan menghambat investasi. Secara umum, kajian ini berkontribusi pada penguatan teori ekonomi makro mengenai pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar modern. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan empiris agar menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

Kata kunci: regulasi pemerintah, stabilitas ekonomi makro, mekanisme pasar, kebijakan ekonomi.

The Role of Government Regulation as a Market Stabilizer and Supervisor from a Macroeconomic Perspective

ABSTRACT

Government regulation plays a strategic role in maintaining macroeconomic stability and overseeing market mechanisms amid global economic dynamics, inflationary pressures, and the rising potential for market failure. This study aims to examine the role of government regulation as an economic stabilizer and market supervisor from a macroeconomic perspective, while analyzing its implications for national economic stability. Utilizing a descriptive qualitative method with a literature review (*library research*) approach, data collection was conducted through documentation and literary studies sourced from books, scientific journals, policy documents, and reports from national and international economic institutions. The data were then analyzed systematically through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that government regulation—through fiscal policy, monetary policy, business competition oversight, and financial sector regulation—positively influences inflation control, economic growth enhancement, unemployment reduction, and consumer protection. Furthermore, the study finds that effective regulation can foster economic stability and increase public trust in the market. Nonetheless, overly stringent regulations have the potential to create market distortions and hinder investment. Overall, this study contributes to strengthening macroeconomic literature regarding the importance of government intervention in maintaining modern market equilibrium. For future

research, it is recommended to employ an empirical approach to yield a more in-depth and comprehensive analysis.

Keyword: *government regulation, macroeconomic stability, market mechanism, economic policy*

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perekonomian modern yang berfungsi sebagai media distribusi barang, jasa, dan faktor produksi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kajian ekonomi makro, stabilitas pasar berkaitan erat dengan tingkat inflasi, pengangguran, investasi, serta daya beli masyarakat. Namun, mekanisme pasar tidak selalu mampu bekerja secara optimal. Berbagai bentuk kegagalan pasar (*market failure*), seperti praktik monopoli, asimetri informasi, eksternalitas, dan ketidakstabilan harga, sering kali menimbulkan distorsi yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini kian kompleks akibat dinamika ekonomi global, seperti krisis energi, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan inflasi pascapandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2024 masih mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan dan energi, sementara ketidakpastian global turut memengaruhi kestabilan pasar domestik. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memegang peranan krusial sebagai stabilisator sekaligus pengawas melalui instrumen regulasi ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan persaingan usaha guna menjaga stabilitas ekonomi makro.

Dalam perspektif ekonomi makro kontemporer, regulasi pemerintah dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui regulasi yang tepat mampu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memitigasi dampak krisis. Penelitian oleh Huyen (2026), misalnya menjelaskan bahwa tata kelola ekonomi dan regulasi keuangan yang efektif memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis digital. Sejalan dengan hal tersebut, Xiao (2026) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak lagi digerakkan oleh mekanisme pasar semata, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas regulasi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Di lingkup domestik, kajian mengenai stabilitas ekonomi di Indonesia turut membuktikan bauran kebijakan fiskal dan moneter memegang peranan krusial dalam mempertahankan pertumbuhan nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa regulasi pemerintah tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas makro secara menyeluruh.

Kendati demikian, masih terdapat keterbatasan dalam literatur terdahulu yang mengkaji bagaimana regulasi pemerintah dapat berfungsi secara simultan sebagai stabilisator ekonomi dan pengawas pasar dalam perspektif ekonomi makro. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada efektivitas kebijakan fiskal atau moneter secara parsial. Akibatnya, pembahasan mengenai integrasi fungsi regulasi dalam pengawasan pasar dan stabilisasi ekonomi masih relatif terbatas. Di sisi lain, pesatnya perkembangan ekonomi digital, eskalasi praktik monopoli di sejumlah sektor, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat menuntut adanya kerangka regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dengan mengolaborasikan keterkaitan antara fungsi regulasi, pengawasan pasar, dan stabilitas ekonomi makro secara terpadu dalam konteks ekonomi modern. Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada realitas bahwa regulasi yang tidak efektif berisiko memicu ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan harga, hingga mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pemerintah sebagai stabilisator ekonomi dan pengawas pasar dalam perspektif ekonomi makro, mengidentifikasi fungsi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar, serta mengelaborasi pengaruh regulasi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan intervensi pemerintah dan regulasi pasar modern. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diproyeksikan menjadi bahan referensi bagi otoritas terkait dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi ekonomi yang lebih efektif. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem pasar yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui pendekatan studi literatur (*library research*). Merujuk pada pandangan Creswell dan Creswell (2018), pendekatan kualitatif berorientasi pada pemahaman makna, interpretasi terhadap fenomena sosial, serta analisis mendalam mengenai suatu permasalahan melalui data konseptual. Pendekatan ini dipilih guna mengeksplorasi secara komprehensif peran regulasi pemerintah sebagai stabilisator dan pengawas pasar dalam perspektif ekonomi makro melalui kajian terhadap fenomena ekonomi, kebijakan fiskal-moneter, serta dinamika pasar yang berkembang. Sementara itu, spesifikasi deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis keterkaitan antarvariabel tersebut berdasarkan fakta serta data sekunder yang relevan. Metode studi literatur diterapkan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, serta laporan resmi lembaga

ekonomi nasional maupun internasional. Pendekatan ini dipandang representatif karena fokus kajian bertumpu pada analisis teori, konsep, dan kebijakan ekonomi makro terkait intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, dokumen regulasi resmi yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, cetak biru kebijakan fiskal dan moneter, serta dokumen kebijakan ekonomi nasional terkait stabilitas pasar. Kedua, literatur pendukung yang diperoleh dari buku teks ekonomi makro, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan resmi dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maupun lembaga ekonomi internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah referensi yang relevan. Karena seluruh data berbasis pada dokumen publik dan tidak melibatkan interaksi lapangan, penelitian ini tidak menggunakan responden manusia. Sebagai gantinya, pemilihan sumber pustaka dilakukan secara sengaja (*purposive selection*) berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, yaitu mengutamakan tingkat relevansi, kredibilitas penerbit, dan kesesuaian mendalam dengan topik penelitian demi menjamin validitas serta keandalan data yang dianalisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif yang mengadaptasi kerangka kerja Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, dilakukan proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data substantif yang selaras dengan tujuan riset, khususnya terkait fungsi regulasi pemerintah dalam stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis guna memetakan pola hubungan antara kebijakan otoritas dan dinamika pasar secara transparan. Tahap akhir diwujudkan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi kritis terhadap data yang telah dianalisis secara sistematis. Demi menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan melakukan komparasi silang antara dokumen regulasi, literatur teoretis, dan data statistik resmi dari berbagai lembaga independen. Melalui instrumen analisis tersebut, kajian ini diproyeksikan mampu menghasilkan sintesis yang mendalam, objektif, serta berkontribusi secara teoretis maupun praktis dalam diskursus regulasi ekonomi makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi regulasi oleh pemerintah memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, sekaligus mengawasi mekanisme pasar agar tetap berjalan secara sehat dan kompetitif. Berdasarkan analisis komparatif terhadap berbagai instrumen kebijakan domestik, ditemukan

bahwa regulasi dalam kerangka ekonomi makro ini bermanifestasi dalam beberapa bentuk utama, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha. Seluruh instrumen tersebut diorientasikan untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan laju inflasi, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran, serta memitigasi eksternalitas negatif akibat kegagalan pasar. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal—melalui pengelolaan instrumen pajak, subsidi, dan belanja negara—menjadi stimulus efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan roda aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, kebijakan moneter yang diotorisasi oleh bank sentral melalui instrumen suku bunga dan manajemen likuiditas terbukti signifikan dalam memelihara stabilitas inflasi dan pasar keuangan. Dalam konteks ini, konseptualisasi dari Xiao (2026) turut memperkuat temuan bahwa kualitas regulasi ekonomi memiliki korelasi linear terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi suatu negara dalam menghadapi volatilitas global.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa otoritas publik berfungsi sebagai stabilisator ekonomi melalui berbagai instrumen pengendalian inflasi. Berdasarkan dokumen kebijakan ekonomi nasional, inflasi merupakan indikator utama yang memengaruhi stabilitas makro karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta kestabilan harga komoditas pokok. Dalam hal ini, intervensi pemerintah diwujudkan melalui kebijakan harga, pemberian subsidi energi dan pangan, serta pengawasan jalur distribusi barang strategis. Selaras dengan langkah tersebut, Bank Indonesia menjalankan fungsi stabilisasi moneter melalui penyesuaian suku bunga acuan guna memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan menjangkar ekspektasi inflasi. Temuan ini membuktikan bahwa bauran kebijakan (*policy mix*) yang sinergis antara pemerintah dan bank sentral mampu meredam gejolak inflasi pascapandemi COVID-19 di tengah ketidakpastian global. Hasil tersebut sejalan dengan studi Balli dan Cimen (2026) yang menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian kredit dan transmisi kebijakan moneter memiliki pengaruh krusial terhadap stabilitas ekonomi. Dalam lanskap teoretis Keynesian, intervensi aktif ini mutlak diperlukan mengingat mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis (*self-correcting*), khususnya saat terjadi distorsi makro atau kontraksi pada permintaan agregat.

Di samping tata kelola inflasi, hasil penelitian membuktikan bahwa regulasi pemerintah berkontribusi signifikan dalam mereduksi tingkat pengangguran serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Otoritas fiskal mengimplementasikan berbagai instrumen strategis, seperti program padat karya, stimulus ekonomi sektoral, eskalasi investasi publik, serta penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis data mengindikasikan bahwa intervensi fiskal melalui program pemulihan ekonomi pascapandemi efektif menstimulasi aktivitas produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Selaras

dengan hal tersebut, reformasi regulasi investasi yang lebih adaptif terbukti mampu menstimulasi arus modal asing (*Foreign Direct Investment*) dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Temuan ini sejalan dengan tesis dari Motadi dan Maduwa (2026) yang menyatakan bahwa stabilitas pasar modal dan kepastian regulasi merupakan determinan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Secara empiris, kajian ini menegaskan adanya korelasi positif antara stabilitas kebijakan makro dengan peningkatan ekspektasi positif serta kepercayaan investor dan pelaku usaha. Dengan demikian, regulasi pemerintah tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pengawasan, melainkan bertindak sebagai katalisator utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian selanjutnya membuktikan bahwa otoritas publik mengemban peran krusial sebagai regulator sekaligus pengawas mekanisme pasar melalui tiga pilar utama: penegakan hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan supervisi sektor keuangan. Dalam ranah persaingan usaha, intervensi melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diorientasikan untuk memitigasi praktik monopoli, kartel, serta oligopoli yang mendistorsi kesejahteraan masyarakat dan menghambat penetrasi pelaku usaha kecil. Kajian ini menemukan bahwa konsentrasi pasar akibat monopoli berisiko memperlebar disparitas ekonomi dan mereduksi efisiensi alokatif, sehingga regulasi anti-monopoli menjadi instrumen vital dalam mewujudkan persaingan yang sehat (*fair trade*). Di sisi lain, perlindungan hak konsumen diwujudkan melalui standarisasi mutu komoditas dan stabilitas harga barang kebutuhan strategis. Sementara pada sektor keuangan, pengetatan regulasi perbankan dan supervisi arus investasi dilakukan demi memelihara stabilitas sistem sistemik sekaligus mencegah penularan krisis finansial (*financial contagion*). Temuan ini selaras dengan studi Sulistyono *et al.* (2026) yang menegaskan bahwa guncangan makroekonomi berkorelasi linear terhadap peningkatan risiko kredit perbankan (*Non-Performing Loan*), sehingga pengawasan prudensial sektor keuangan menjadi determinan utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa intervensi regulasi pemerintah memberikan implikasi ganda terhadap lanskap ekonomi makro. Pada satu sisi, regulasi yang efektif terbukti mampu memelihara stabilitas harga, mendorong redistribusi pendapatan yang lebih merata, memitigasi risiko ketidakpastian ekonomi, serta menstimulasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kinerja ketahanan ekonomi nasional juga dapat diperkokoh melalui implementasi kebijakan stimulus kontra-siklikal (*counter-cyclical policies*) dan jaringan pengaman sosial saat menghadapi guncangan krisis global. Argumen ini sejalan dengan tesis Azak (2026) yang menegaskan bahwa intervensi otoritas pada periode krisis memegang peranan

krusial dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus mereduksi transmisi dampak resesi ke sektor riil. Namun, di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi eksternalitas negatif dari regulasi yang eksekutif, seperti inefisiensi birokrasi, distorsi pasar, ketergantungan struktural terhadap subsidi, serta hambatan investasi akibat regulasi yang terlalu restriktif. Dalam beberapa kasus, intervensi yang asimetris dan kurang tepat sasaran justru berisiko mendegradasi efisiensi alokatif pasar dan memicu beban fiskal (*fiscal burden*) yang tinggi bagi anggaran negara. Oleh sebab itu, diperlukan titik keseimbangan optimal (*optimum equilibrium*) antara kebebasan mekanisme pasar dan intensitas intervensi pemerintah guna menjaga stabilitas makro tanpa mengorbankan inovasi serta dinamika pasar.

Dalam perspektif ekonomi makro, hasil penelitian ini mengonfirmasi adanya dikotomi teoretis antara mazhab Klasik dan Keynesian terkait urgensi regulasi pemerintah. Doktrin ekonomi Klasik berparadigma bahwa pasar memiliki kapabilitas untuk mencapai ekuilibrium secara otomatis (*self-correcting mechanism*) melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa membutuhkan intervensi pemerintah yang signifikan. Sebaliknya, postulat Keynesian menggarisbawahi urgensi intervensi aktif pemerintah sebagai instrumen stabilisasi ketika pasar mengalami kegagalan, seperti fenomena pengangguran struktural dan kontraksi ekonomi. Temuan kajian ini membuktikan bahwa dalam lanskap ekonomi modern yang diwarnai oleh arus globalisasi dan transformasi digital, intervensi pemerintah tetap menjadi prasyarat mutlak guna menjamin stabilitas makro serta mengawasi dinamika pasar yang kian kompleks. Realitas tersebut terefleksi dari meningkatnya kebutuhan standarisasi regulasi pada sektor ekonomi digital, transaksi elektronik, arus investasi digital, hingga proteksi data konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat sintesis bahwa regulasi otoritas bukan lagi sekadar elemen pelengkap, melainkan pilar determinan dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro modern.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan (*policy implications*) mengenai urgensi perumusan regulasi ekonomi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik (*social welfare*). Efektivitas regulasi tersebut secara inheren ditentukan oleh beberapa faktor pendukung, seperti sinergisitas koordinasi antarlembaga, stabilitas politik, kapasitas institusi ekonomi, serta tingkat legitimasi kebijakan di mata publik. Sebaliknya, hambatan struktural yang diidentifikasi meliputi lemahnya fungsi pengawasan, kompleksitas birokrasi, ketidakpastian hukum (*regulatory uncertainty*), dan transmisi risiko dari gejolak ekonomi global. Kajian ini memiliki keterbatasan metodologis karena sepenuhnya mengandalkan pendekatan studi literatur (*library research*) tanpa melakukan verifikasi data lapangan secara langsung. Akibatnya, validitas interpretasi temuan sangat bergantung pada ketersediaan, akurasi, dan kualitas sumber sekunder yang dianalisis. Guna mengatasi limitasi tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk

menerapkan metode campuran (*mixed methods*) atau pendekatan empiris melalui survei lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Langkah ini krusial untuk memperoleh potret komprehensif mengenai efektivitas implementasi regulasi pemerintah dalam memelihara stabilitas makro serta mengawasi dinamika pasar di berbagai sektor riil.

KESIMPULAN

Secara komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi pemerintah memegang peranan strategis sebagai stabilisator ekonomi sekaligus pengawas pasar dalam kerangka ekonomi makro. Melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, regulasi perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha, otoritas publik mampu memelihara stabilitas harga, mengendalikan laju inflasi, mereduksi tingkat pengangguran, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan empiris ini menegaskan bahwa intervensi aktif pemerintah mutlak diperlukan untuk memitigasi berbagai bentuk kegagalan pasar (*market failure*) seperti praktik monopoli, distorsi harga, dan volatilitas makro akibat transmisi tekanan global. Dengan demikian, regulasi ekonomi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen pengendali mekanis, melainkan bertindak sebagai pilar strategis dalam menciptakan keseimbangan pasar dan memproteksi kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, konseptualisasi dalam kajian ini memperkuat relevansi teori Keynesian mengenai urgensi intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya dalam menghadapi guncangan krisis dan tingginya ketidakpastian pasar modern.

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi makro dengan mengonseptualisasikan hubungan antara regulasi otoritas, pengawasan pasar, dan stabilitas makro secara terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam era globalisasi dan digitalisasi, intervensi pemerintah semakin krusial guna mengawasi ekspansi ekonomi digital, kompleksitas transaksi elektronik, serta proteksi terhadap konsumen dan investasi. Dari dimensi praktis dan sosial, temuan ini mengindikasikan urgensi bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi ekonomi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik demi terciptanya ekosistem pasar yang sehat, adil, dan kompetitif. Kendati demikian, analisis ini juga mengidentifikasi bahwa regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memicu inefisiensi birokrasi, distorsi pasar, serta hambatan investasi. Oleh karena itu, diperlukan titik keseimbangan (*optimum balance*) antara kebebasan mekanisme pasar dan batas intervensi pemerintah. Atas dasar tersebut, otoritas terkait disarankan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menjamin kepastian hukum agar kebijakan ekonomi dapat terimplementasi secara optimal dan berkelanjutan.

Kajian ini memiliki keterbatasan metodologis karena sepenuhnya bertumpu pada pendekatan studi literatur tanpa artikulasi data lapangan secara langsung. Akibatnya,

objektivitas temuan sangat bergantung pada kualitas, validitas, dan ketersediaan sumber pustaka yang diakses. Selain itu, cakupan analisis belum mengomparasikan secara spesifik efektivitas regulasi pada sektor-sektor dinamis, seperti ekonomi digital, pasar keuangan syariah, maupun industri berbasis teknologi tinggi. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode campuran (*mixed methods*) atau pendekatan empiris melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi lapangan guna menghasilkan generalisasi data yang lebih komprehensif. Agenda riset mendatang juga dapat diarahkan pada analisis sektoral yang lebih spesifik serta pengukuran dampak regulasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dari aspek praktis, otoritas pembuat kebijakan diharapkan mampu memformulasikan kerangka regulasi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap volatilitas global demi mengoptimalkan stabilitas ekonomi makro serta pengawasan pasar modern.

REFERENSI

- Azak, F. (2026). *The causes and effects of financial crises from macro and micro perspectives: An empirical investigation from top ten emerging countries*. University of Hull Repository.
- Balli, P. E., & Cimen, S. K. (2026). Does credit expansion trigger inflation? An empirical analysis of the credit channel of monetary transmission in OECD countries. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8632769/v1>
- Boediono. (2020). *Ekonomi makro*. BPFE Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hirota, K., & Yuasa, K. (2026). Growth and resilience. In *Economic development and stability studies* (pp. 77–98). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-95-6220-6_4
- Huyen, T. P. (2026). Economic-financial governance for sustainable, inclusive and digital development: A conceptual framework for emerging economies. *Multidisciplinary Research Journal*, 6(3), 1–12.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (11th ed.). Worth Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Motadi, M. S., & Maduwa, N. S. (2026). The role of capital markets in enhancing economic growth and job creation in South Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 15(1), 55–68. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v15i1.4611>

- Rahman, M. M., Talukder, N., Hooi, K. K., & Faruq, M. O. (2026). The role of regulatory capital in shaping FinTech's impact on bank intermediation costs. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8315515/v1>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi teori pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistiyono, E., Effendy, N., & Kurniawan, R. (2026). The impact of macroeconomic shocks on credit risk in Indonesian banking using machine learning. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 10(1), 44–58. <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i1.54>
- Xiao, J. (2026). Economic growth: Theories, drivers, and contemporary challenges in a changing world. *Advances in Management Sciences*, 30(4), 55–68. <https://doi.org/10.46544/ams.v30i4.09>